BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan *e-commerce* ialah perlindungan preventif dengan melakukan standar sertifikasi dalam melakukan penyelenggaraan sistem elektronik setiap penyedia layanan *e-commerce*, serta perlindungan data pribadi dibebankan kepada penyedia layanan *e-commerce* dalam bentuk kebijakan privasi. Akan tetapi perlindungan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Karena belum adanya pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pertanggung-jawaban penyedia layanan *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data, dan pemberian sanksi atas kegagalan perlindungan data pribadi. Sedangkan terhadap perlindungan yang disediakan oleh layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace* terhadap data pribadi penggunanya, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena banyaknya klausula eksponarasi yang mana sangat merugikan pengguna layanan dan menyulitkan pengguna ketika hendak menuntut haknya ketika mengalami kerugian atas kegagalan perlindungan data pribadi oleh penyedia layanan *e-commerce* dalam transaksi *marketplace*.
2. Pertanggung-jawaban ketika terjadi kebocoran data pribadi oleh layanan *e-commerce*, dapat dilakukan dengan pengguna mengajukan pengaduan ke

menteri KOMINFO, dan perkaranya dapat diselesaikan secara litigasi atau nonlitigasi, untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang di derita pengguna layanan *e-commerce*. Sehingga dalam hal pertanggung-jawaban penyedia layanan *e-commerce* ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi tidak memiliki batasan atau acuan dalam menentukan bentuk pertanggung-jawaban atas kegagalan perlindungan data pribadi *pengguna e-commerce*.

B. Saran

Mengingat pentingnya hak atas data pribadi dan perlindungan data pribadi di era teknologi sekarang, perlunya upaya untuk meningkatkan penegakan hukum atas perlindungan data pribadi dan pengawasan khususnya pada kewajiban-kewajiban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Serta menjadikan regulasi perlindungan data pribadi diatur pada tingkat undang-undang menjadi suatu hal yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak privasi dan hubungan-hubungan antar pihak yang lebih kuat. Selain itu Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pihak manapun yang berkepentingan dalam pemrosesan data pribadi.